



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai penghargaan atas kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KINERJA
DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja Daerah, selanjutnya disebut dengan TKD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kinerja yang dicapai.
2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut CPNS adalah CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. PNS Pusat adalah PNS Pusat yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
8. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
9. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pemerintah Provinsi Gorontalo selaku pengguna

11. Sasaran Kerja Pegawai bulanan yang selanjutnya disingkat SKP-B adalah rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS dalam 1 (satu) masa kinerja.
12. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dalam masa kinerja.
14. Penilaian Kinerja adalah proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja dan perilaku kerja PNS.
15. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan.
16. Bobot Pekerjaan adalah nilai kumulatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang suatu pekerjaan/jabatan.

BAB II

PENERIMA TKD

Pasal 2

- (1) Penerima TKD adalah PNS dan Calon PNS.
- (2) PNS penerima TKD adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (3) PNS Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan TKD setelah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (5) PNS pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan TKD setelah bertugas 1 (satu) tahun, kecuali menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional.
- (6) PNS Provinsi yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo dapat diberikan TKD selama pada instansi tersebut tidak memperoleh tunjangan sejenis.
- (7) Pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.

BAB III
PENETAPAN TARGET DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Penetapan Target

Pasal 3

- (1) Kinerja dinilai berdasarkan atas capaian SKP-B dalam satu masa penilaian dan bobot jabatan/pekerjaan.
- (2) Setiap PNS wajib menyusun SKP bulanan berdasarkan rencana kerja tahunan SKPD, standar teknis kegiatan sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan, dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan.

Pasal 4

- (1) SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.
- (2) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung/pejabat penilai.
- (3) Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh atasan langsung/pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.
- (4) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap awal bulan masa penilaian kinerja.
- (5) Jika terdapat alasan-alasan yang cukup, SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan kembali sebelum penilaian kinerja dilakukan.
- (6) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melampirkan bukti-bukti alasan serta SKP sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.
- (2) Formulir Penetapan SKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Bobot jabatan/pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Fungsi;
 - b. Risiko;
 - c. Jumlah Anggaran;

KARO	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
------	-------	---------	-------	-------

d. Volume Pekerjaan.

- (2) Bobot jabatan/pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Penilaian TKD

Pasal 7

TKD dibayarkan berdasarkan dua unsure yaitu SKP dan Perilaku Kerja

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dalam satu masa penilaian berdasarkan SKP dan perilaku kerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot sebagai berikut :
 - a. SKP sebesar 60% (enam puluh persen), dan
 - b. Perilaku Kerja sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) PNS yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berhak menerima TKD.
- (4) Komponen penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. disiplin sebesar 30%;
 - b. kepemimpinan/kerjasama sebesar 10%.

Pasal 9

- (1) Penilaian untuk masing-masing indikator Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:

a. Sangat Baik	:	90 - 100
b. Baik	:	80 - 89
c. Cukup Baik	:	60 - 79
d. Kurang Baik	:	50 - 59
e. Tidak Baik	:	< 50
- (2) Nilai SKP dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus).
- (3) Penilaian untuk masing-masing indikator perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

a. Sangat Baik	:	90 - 100
b. Baik	:	80 - 89
c. Cukup Baik	:	60 - 79
d. Kurang Baik	:	50 - 59
e. Tidak Baik	:	< 50
- (4) Nilai kinerja yang diperoleh selama masa kinerja adalah total nilai SKP dikali 60% (enam puluh persen) ditambah dengan total nilai perilaku dikali 40% (empat puluh persen).

- (5) Format dan uraian penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja dilakukan setiap awal bulan berikutnya oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Untuk penilaian kinerja bulan Desember tahun berkenaan dilakukan pada akhir bulan Desember tahun berkenaan.
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diverifikasi oleh pimpinan SKPD/Unit Kerja secara berjenjang.

BAB IV

KATEGORI DAN BESARAN TKD

Pasal 11

TKD digolongkan dalam kategori:

- a. TKD Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. TKD Jabatan Administrasi;
- c. TKD Jabatan Fungsional.

Pasal 12

- (1) Besaran TKD untuk Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sebagai berikut:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon Ib) sebesar Rp25.000.000,00;
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIa/Asisten) sebesar Rp14.500.000,00;
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIa/Kepala SKPD/Staf Ahli) sebesar Rp12.000.000,00;
 - d. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIb) sebesar Rp9.550.000,00.
- (2) Besaran TKD untuk Jabatan Administrasi adalah sebagai berikut:
 - a. Jabatan Administrator Kepala Kantor (Eselon III) sebesar Rp6.100.000,00;
 - b. Jabatan Administrator (Eselon IIIa) sebesar Rp5.600.000,00;
 - c. Jabatan Administrator (Eselon IIIb) sebesar Rp4.650.000,00;
 - d. Jabatan Pengawas (Eselon IV) sebesar Rp4.000.000,00.
 - e. Jabatan Pelaksana:
 - 1) Staf Administrasi sebesar Rp2.250.000,00;
 - 2) Staf Teknis sebesar Rp2.350.000,00.
- (3) Besaran TKD untuk Jabatan Fungsional tercantum pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

- (4) Terhadap PNS yang bekerja di Kantor Perwakilan Jakarta ditambahkan 30% (tiga puluh persen) dan Seksi Penghubung Makassar ditambahkan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Gubernur dapat menetapkan besaran TKD bagi PNS non struktural yang memiliki Pangkat Pembina Tingkat I Golongan IVb ke atas dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Bagi PNS atau CPNS yang mengikuti Diklat LEMHANAS, Diklat Teknis, Diklat Fungsional atau Diklat Dalam Jabatan serta cuti tahunan diberikan TKD.
- (2) Bagi PNS atau CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengikuti Diklat selama satu masa penilaian kinerja dikecualikan dari penyusunan SKP.
- (3) Bagi PNS atau CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengikuti Diklat kurang dari satu masa penilaian wajib menyusun SKP dalam sisa waktu masa penilaian.
- (4) Bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) wajib menyampaikan laporan perkembangan Diklat.

Pasal 14

- (1) Besarnya TKD yang diterima setiap masa kinerja adalah Tarif TKD dikali dengan bobot pekerjaan dan dikali dengan total penilaian kinerja.
- (2) Besarnya TKD yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan PPh Pasal 21.
- (3) Setiap pembayaran TKD harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Perhitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran V Peraturan ini.
- (5) Jumlah TKD yang dibayarkan untuk setiap SKPD dan perhitungannya terdapat pada Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) TKD dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.
- (2) TKD dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (3) Pembayaran TKD untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 16

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Sekretaris Daerah dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan TKD Tambahan.

Pasal 17

Tunjangan Kinerja Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 dibayarkan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Pasal 18

- (1) PNS yang tidak masuk kerja karena alasan pribadi selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) masa kinerja atau mengikuti pendidikan formal dalam bentuk tugas belajar di luar Provinsi Gorontalo tidak memperoleh TKD.
- (2) PNS dan CPNS yang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dikenakan pengurangan dan atau tidak diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman Disiplin Ringan:
 2. sebesar 20% dari TKD selama 2 (dua) masa kinerja penilaian untuk hukuman disiplin ringan teguran lisan;
 3. sebesar 30% dari TKD selama 3 (tiga) masa kinerja penilaian untuk hukuman ringan tertulis;
 4. sebesar 50% dari TKD selama 4 (empat) masa kinerja penilaian untuk hukuman ringan pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Hukuman Disiplin Sedang:
 1. sebesar 75% dari TKD selama 3 (tiga) masa kinerja penilaian untuk hukuman sedang penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 2. sebesar 100% dari TKD selama 4 (empat) masa kinerja penilaian untuk hukuman sedang penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 3. sebesar 100% dari TKD selama 5 (lima) masa kinerja penilaian untuk hukuman sedang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - c. Hukuman Disiplin Berat:
 1. sebesar 6 (enam) masa kinerja penilaian untuk hukuman berat penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 2. sebesar 6 (enam) masa kinerja penilaian untuk hukuman berat pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 3. sebesar 6 (enam) masa kinerja penilaian untuk hukuman berat pembebasan dalam jabatan.

- (3) Setiap atasan langsung yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS dan CPNS yang menjadi bawahan wajib menyampaikan keputusan penjatuhan hukuman kepada yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2016
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN
ANGGARAN 2016

1. LAMPIRAN I : URAIAN PENILAIAN PERILAKU KERJA
2. LAMPIRAN II : PENETAPAN SASARAN KERJA PEGAWAI
3. LAMPIRAN III : FORMULIR PENETAPAN SASARAN KERJA PEGAWAI
4. LAMPIRAN IV : DASAR PERHITUNGAN TKD JABATAN FUNGSIONAL
5. LAMPIRAN V : PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
(PPh 21)
6. LAMPIRAN VI : DAFTAR PEMBAYARAN TKD

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN
ANGGARAN 2016

URAIAN PENILAIAN PERILAKU KERJA

1. Disiplin

Kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas, kepatuhan jam kerja, menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

- a. **Sangat baik** : yaitu tidak pernah tidak hadir, tidak pernah tidak apel pagi/sore, tidak pernah terlambat atau tidak pernah pulang lebih cepat dan selalu menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- b. **Baik** : secara kumulatif 1-2 kali tidak hadir tanpa pemberitahuan, tidak apel pagi/sore, terlambat/pulang cepat dan 1-2 kali tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- c. **Cukup baik** : kumulatif 3-4 kali tidak masuk kantor, tidak apel pagi/sore, terlambat/pulang cepat, izin, sakit dan 3-4 kali tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- d. **Kurang baik** : secara kumulatif 5-6 kali tidak masuk kantor, tidak apel pagi/sore, terlambat/pulang cepat, izin, sakit dan 5-6 kali tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- e. **Tidak baik** : secara kumulatif lebih dari 7 kali tidak masuk kantor, tidak apel pagi/sore, selalu terlambat/pulang cepat, izin, sakit dan lebih dari 7 kali tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

2. Kerjasama

Kerja Sama adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

- a. **Sangat baik** : sangat berkemauan dan mampu menjalin kerja sama.
- b. **Baik** : berkemauan dan mampu menjalin kerja sama.
- c. **Cukup baik** : cukup berkemauan dan cukup mampu menjalin kerja sama.
- d. **Kurang baik** : kurang berkemauan dan kurang mampu menjalin kerja sama.
- e. **Tidak baik** : tidak berkemauan dan tidak mampu menjalin kerja sama.

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN
ANGGARAN 2016

Bobot Pekerjaan							
NO.	SKPD	BOBOT SKPD 2016	Ess. III	Eselon IV	Staf		JFT
					Teknis	Adm.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sekretaris Daerah	1.00					
2	Asisten	0.99					
3	Dinas PU	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.97
4	Dikbudpora	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.97
5	Bappeda	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.97
6	Dinas Keu. & Aset Daerah	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.97
7	Dinas Kesehatan	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.97
8	BKPPD	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.97
9	Inspektorat Provinsi Gorontalo	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.97
10	Dinas Pertanian TP & H	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.96
11	Dinas Kehutanan & ESDM	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.96
12	Dinas Perikanan	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.96
13	Dinas Peternakan & Perkebunan	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.96
14	RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	0.98		0.97	0.96	0.95	0.97
15	BPM-PDT	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.96
16	Dishubparkominfo	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.96
17	Koperasi, UMKM, Perindag	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.96
18	Disnaker dan Transmigrasi	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.96
19	BPM-PTSP	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.96
20	Biro Pemerintahan	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	
21	Biro Pengadaan	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	
22	Biro Hukum dan Organisasi	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	
23	Biro Umum	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	
24	Biro Humas dan Protokol	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	
25	Biro P2E	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	
26	Biro PP Kesra	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.95
28	Staf Ahli	0.97					
29	Kantor Satpol PP dan Lhmas	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.95
30	Sekretariat DPRD	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.95
31	BPBD	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.95
32	Badan Ketahanan Pangan & PLJ	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.95
33	Kantor Perwakilan Jakarta	0.97		0.96	0.95	0.94	0.96
34	Dinas Sosial	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.95
35	Bakorluh	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.95
36	BLH dan Riset Daerah	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.95
37	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	0.95		0.94	0.93	0.92	0.94
38	Sekretariat KORPRI	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.93
Catatan :							
1 Staf Teknis, terdiri dari:							
a. POKJA ULP UPT Dinas PU							
b. Pengawas Lapangan pada Dinas PU							
c. Penjaga Pintu Air pada Dinas PU							
d. Sopir Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten/Kepala SKPD/Kepala Biro/Staf Ahli/Kepala Kantor							
e. Petugas Humas dan Protokol pada Biro Umum dan Humas yang ditetapkan dengan SK Gubernur							
f. Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dengan SK Gubernur							
g. Pengelola Program Aplikasi Sistem pada SKPD (e-Renggar, SIMDA, e-Monev, e-protrack, SIMPEG, e-Formasi, SIM-PD, SIMPERBANG, SIPAMOR, dll.)							
h. Penganalisa Data (LPPD, LAKIP, LKPD, LKPJ, dll)							
2 Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditetapkan dengan SK Gubernur							

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 JANUARI 2016
TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN
ANGGARAN 2016

FORMULIR PENETAPAN SASARAN KERJA PEGAWAI

Nama Pegawai Yang Dinilai : Rian M. Laya
Jabatan : Kepala Seksi Anggaran Area I Bidang Anggaran
Masa Penilaian (Bulan) : Januari 2016

No.	Kegiatan Tugas Jabatan	AK*)	Target Hasil	
			Vol.	Satuan
A	Pelaksanaan Tugas Manajerial			
1	Merencanakan kegiatan bulanan			
	Penetapan anggaran kas kegiatan pada seksi Anggaran Area I	0	2	Dokumen
2	Memeriksa dan mengoreksi tugas bawahan	0	15	Dokumen
3	Memberi disposisi terhadap naskah dinas	0	15	Dokumen
4	Memberi tanda tangan/paraf terhadap naskah dinas	0	35	Dokumen
5	Membuat konsep telaah sesuai disposisi pimpinan	0	15	Dokumen
B	Pelaksanaan Program/Kegiatan			
1	Surat Penyediaan Dana (SPD)			
a	Menerima surat permohonan SKPD	0	15	Dokumen
b	Memverifikasi surat permohonan SKPD	0	15	Dokumen
c	Koordinasi dengan BUD Kustodian	0	15	Dokumen
d	Mengkoordinir penginputan penyediaan dana dalam aplikasi SIMDA	0	15	Dokumen
e	Penyampaian ketersediaan dana dalam aplikasi SIMDA	0	15	Dokumen
f	Pelaporan dan evaluasi	0	15	Dokumen
2	SIMDA			
a	Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim Pengembang Aplikasi SIMDA	0	1	Dokumen
b	Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim Pengembang Aplikasi SIM-PD	0	15	Dokumen
c	Memberi disposisi penginputan persetujuan pergeseran anggaran dalam aplikasi SIMDA	0	15	Dokumen
d	Koordinasi Penginputan RKA-SKPD	0	15	Dokumen

Gorontalo, 2016

Pejabat Penilai,

Pegawai Yang Dinilai,

H. REFLIN BUATA, SE., M.Ec.Dev.
NIP. 19761228 200012 1 002

RIAN M. LAYA
NIP. 19760103 200212 1 006

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 JANUARI 2016
TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN
ANGGARAN 2016

FORMULIR PERHITUNGAN KINERJA

Nama Pegawai Yang Dinilai : Rian M. Laya
Jabatan : Kepala Seksi Anggaran Area I Bidang Anggaran
Masa Penilaian (Bulan) : Januari 2016

I. PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI :

No.	Kegiatan Tugas Jabatan	AK*)	Target Hasil		Realisasi	
			Vol.	Satuan	Vol.	%
A	Pelaksanaan Tugas Manajerial					100.00
1	Merencanakan kegiatan bulanan					
	Penetapan anggaran kas kegiatan pada seksi Anggaran Area I	0	2	Dokumen	2	100.00
2	Memeriksa dan mengoreksi tugas	0	15	Dokumen	15	100.00
3	Memberi disposisi terhadap naskah dinas	0	15	Dokumen	15	100.00
4	Memberi tanda tangan/paraf terhadap naskah dinas	0	35	Dokumen	35	100.00
5	Membuat konsep telaah sesuai disposisi pimpinan	0	15	Dokumen	15	100.00
B	Pelaksanaan Program/Kegiatan					94.67
1	Surat Penyediaan Dana (SPD)					
a	Menerima surat permohonan SKPD	0	15	Dokumen	15	100.00
b	Memverifikasi surat permohonan SKPD	0	15	Dokumen	15	100.00
c	Koordinasi dengan BUD Kustodian	0	15	Dokumen	15	100.00
d	Mengkoordinir penginputan penyediaan dana dalam aplikasi SIMDA	0	15	Dokumen	15	100.00
e	Penyampaian ketersediaan dana dalam aplikasi SIMDA	0	15	Dokumen	15	100.00
f	Pelaporan dan evaluasi	0	15	Dokumen	7	46.67
2	SIMDA					
a	Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim Pengembang Aplikasi SIMDA	0	1	Dokumen	1	100.00
b	Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim Pengembang Aplikasi SIM-PD	0	15	Dokumen	15	100.00
c	Memberi disposisi penginputan persetujuan pergeseran anggaran dalam aplikasi SIMDA	0	15	Dokumen	15	100.00
d	Koordinasi Penginputan RKA-SKPD	0	15	Dokumen	15	100.00
Nilai Capaian SKP = Jumlah Seluruh Nilai Capaian / Jumlah Kegiatan Tugas						97.33

II. PENILAIAN KINERJA PEGAWAI :

No.	Indikator Kinerja		Penilaian Kinerja	Jumlah Nilai
	Uraian	Nilai %		
1	2	3	4	5 (3X4)
	Capaian SKP :			
1	Nilai Capaian SKP	60%	97.33	58.40
	Capaian Perilaku Kerja :			
2	Disiplin	30%	98.00	29.40
3	Kepemimpinan/Kerjasama	10%	96.00	9.60
NILAI KINERJA		(Sangat Baik)		97.40

Gorontalo, 2016

Pejabat Penilai,

Pegawai Yang Dinilai,

H. REFLIN BUATA, SE., M.Ec.Dev.
NIP. 19761228 200012 1 002

RIAN M. LAYA
NIP. 19760103 200212 1 006

Catatan :

- Setiap pejabat dan pegawai mempunyai satu formulir kertas kerja penilaian kinerja.
- Angka Kredit (AK) diisi bagi PNS Jabatan Fungsional.
- Contoh diatas merupakan pencapaian kinerja Pejabat Esselon IV.
- Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan mempunyai dua tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun berkenaan yaitu Penyediaan SPD dan Pelaksanaan SIMDA ditambah dengan tugas-tugas manajerial.
- Yang bersangkutan melaksanakan penyediaan dana dan pelayanan SIMDA kepada 15 SKPD setiap bulan dan oleh sebab itu target volumenya sebanyak 15 dokumen SKPD.
- Pencapaian kinerja bulanan dihitung sesuai dengan urutan proses kegiatan dan pada setiap proses dinilai berapa dokumen yang dapat dicapai (seperti contoh diatas tugas manajerial tercapai 100%, tugas pelaksanaan program/kegiatan pada proses terakhir hanya mencapai 95,15%)
- Berdasarkan capaian pada huruf A dan B dijumlah dan dibagi 2 menghasilkan capaian kinerja akhir pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

DASAR PERHITUNGAN TKD JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan /Tingkat Jabatan	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Tunjangan Kinerja Daerah 2016
Widyaiswara			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,885,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,882,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,624,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 7,892,500
Perencana			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,885,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,960,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 7,008,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 7,892,500
Analisis Kepegawaian			
Terampil	Pelaksana	II/c – II/d	Rp 2,919,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3,157,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,812,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,102,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5,099,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 9,777,600
Auditor Kepegawaian			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,432,000
Auditor			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,825,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,593,750
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,432,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 7,482,500
Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah /Pengawas Pemerintahan (P2UPD)			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,432,000

Pengawas Sekolah			
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,549,250
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,779,200
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 6,170,500
Pamong Belajar			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,130,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,960,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,624,000
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,825,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,437,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,808,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,417,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,664,000
Penera			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,825,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,468,750
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,808,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,417,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,664,000
Penguji Mutu Barang			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,825,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,468,750
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,808,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,417,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,664,000
Instruktur			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,825,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,468,750
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,808,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,417,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,664,000
Mediator Hubungan Industrial			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,808,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,417,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,664,000

Penyuluh Pertanian			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,750,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,950,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3,190,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 4,037,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,186,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5,285,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 7,123,200
	Utama	V/d – IV/e	Rp 8,097,500
Pengawas Benih Tanaman			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,750,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,950,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3,190,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,962,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,186,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5,192,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 7,008,000
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,750,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,950,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3,190,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,887,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,144,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5,146,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,892,800
Penyuluh Perikanan			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,670,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,687,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,432,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 7,482,500
Pengawas Perikanan			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,437,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,808,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,417,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,971,200
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 6,908,500

Inspektur Tambang			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,885,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,960,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,720,000
Penyuluh Kehutanan			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,750,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,950,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3,190,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 4,037,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,186,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5,285,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 7,123,200
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 8,097,500
Polisi Kehutanan			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,750,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,950,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3,256,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 4,112,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,186,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5,564,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 7,353,600
Polisi Pamong Praja (Pol PP)			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,670,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,687,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,432,000
Medik Veteriner			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,186,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5,471,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 7,296,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 8,220,500
Paramedik Veteriner			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,750,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,950,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3,223,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 4,075,000
Pengawas Bibit Ternak			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 3,050,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3,600,000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 4,600,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,450,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5,200,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 7,200,000

Pustakawan			
Terampil	Pelaksana	II/a – II/b – II/c	Rp 2,940,000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 3,157,000
	Penyelia	III/c - III/d	Rp 3,937,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 4,158,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 5,037,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,892,800
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 7,687,500
Arsiparis			
Terampil	Pelaksana	II/a – II/b – II/c	Rp 2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c - III/d	Rp 3,500,000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,815,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,378,750
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5,664,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 6,457,500
Dokter			
Ahli	Pertama	III/b	Rp 3,885,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,960,000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 7,008,000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 7,892,500
Perawat			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,670,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,687,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,336,000
Bidan			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2,670,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 3,687,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6,336,000

Pembimbing Kesehatan Kerja				
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	3,815,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4,378,750
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	5,664,000
Epidemiolog Kesehatan				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,670,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,687,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,336,000
Nutrisionis				
Terampil	Pelaksana	II/a – II/b – II/c	Rp	2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,687,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,336,000
Pranata Laboratorium Kesehatan				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,670,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,687,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,336,000
Pranata Komputer				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,670,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,593,750
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	3,850,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4,727,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6,432,000
	Utama	V/d – IV/e	Rp	7,482,500
Pranata Hubungan Masyarakat				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2,670,000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	2,824,500
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	2,986,500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3,437,500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	3,808,000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4,417,500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	5,952,000

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015

**PERHITUNGAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21)**

NO	URAIAN PENGHASILAN	BESARAN PPh 21	URAIAN PERHITUNGAN
1.	Gol. I dan II	0 %	<u>Catatan:</u> 1. Dasar pengenaan PPh adalah jumlah TKD yang terdapat pada kolom 10 Lampiran VI 2. Contoh perhitungan a. Nona (Gol. II) menerima TKD = Rp2.450.000,- PPh 21 0 % x Rp. 2.450.000.- = Rp0,- b. Helmi, Ess. IV (Gol. III) menerima TKD = Rp4.000.000,- PPh 21 5 % x Rp. 4.000.000 = Rp200.000,- c. Danial, Ess. IIIA (Gol. IV) menerima TKD = Rp5.600.000,- PPh 21 15 % x Rp. 5.600.000 = Rp840.000,- d. Huzairin, Ess. IIA (Gol. IV) menerima TKD = Rp12.000.000,- PPh 21 15 % x Rp. 12.000.000 = Rp1.800.000,-
2.	Gol. III	5 %	
3.	Gol. IV	15 %	

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR PEMBAYARAN TKD

Nama SKPD :
Masa Penilaian :

No	Nama	Jabatan	Eselon	NPWP	Dasar TKD (Rp)	Bobot Pekerjaan	Nilai TKD setelah Bobot Pekerjaan	Nilai Kinerja (%)	Jumlah TKD (Rp)	Potongan Hukuman Disiplin	Jumlah TKD sebelum PPh (Rp)	Potongan PPh 21	Jumlah Yang Diterima
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 x 7)	9	10 (8 x 9)/100	11 (% pot x 10)	12 (10 - 11)	13	14 (12 - 13)
1	Danial	Administrator	III	XX.XXX.XXX.X-822.000	5.600.000	0,98	5.488.000	95,12	5.220.186	-	5.220.186	783.028	4.437.158

Menyetujui,

Kepala

()

Bendahara Pengeluaran

()

Catatan :

- Kolom 6 : Diperoleh dari Dasar TKD pada Pasal 12
- Kolom 7 : Adalah Bobot Pekerjaan sebagaimana pada lampiran II
- Kolom 9 : Adalah Nilai Kinerja sebagaimana pada lampiran IV
- Kolom 11 : Diperoleh dari Potongan Hukum Disiplin pada Pasal 18
- Kolom 13 : Diperoleh dari Potongan PPh pada Lampiran VI